

ANALISIS DATA PANEL PENGARUH KAPASITAS FISKAL DAERAH TERHADAP FLUKTUASI KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

Sarasni¹, Herwin Mopangga², Yenni Mulyati³

¹Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; sarasni291@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; herwinmopangga@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia; herwinmopangga@ung.ac.id

Corresponden E-mail; sarasni291@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 15 Maret 2026 Direvisi: 27 Maret 2026 Disetujui: 28 Juni 2026 Tersedia Daring: 06 Juli 2026	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di 6 kabupaten/kota Provinsi Gorontalo. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan mengolah 66 observasi data sekunder berjenis panel selama periode 2015–2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan tahapan pemilihan model, <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) ditetapkan sebagai spesifikasi analisis terbaik. Hasil estimasi regresi secara parsial menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien -2.309126 dan probabilitas 0.0113. Sebaliknya, instrumen dana transfer pusat belum menunjukkan signifikansi statistik: DAU berpengaruh negatif (koefisien -0.982788; prob. 0.8227), sementara DAK (koefisien 0.270609; prob. 0.1944) dan DBH (koefisien 1.400562; prob. 0.0815) menunjukkan arah hubungan positif, tetapi tidak signifikan secara statistik. Secara simultan, keempat variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap fluktuasi kemiskinan (probabilitas F-statistic 0.000000) dengan koefisien determinasi (<i>R-squared</i>) sebesar 93,10%. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal lokal memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan kualitas belanja publik yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci:

Tingkat Kemiskinan;
Dana Transfer;
Pendapatan Asli Daerah;
Regresi Data Panel

ABSTRACT
Keywords: Poverty Rate; Transfer Funds; Local Own Revenue; Panel Data Regression <i>This study aims to analyze the effect of regional fiscal capacity, consisting of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and Local Own-Source Revenue (PAD), on the fluctuation of poverty rates across 6 regencies/cities in Gorontalo Province. A quantitative approach was employed by processing 66 observations of secondary panel data over the 2015–2025 period, sourced from Statistics Indonesia (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Based on the model selection stages, the Fixed Effect Model (FEM) was determined as the best analysis specification. Partial regression estimation results indicate that PAD has a negative and significant effect on the poverty rate with a coefficient of -2.309126 and a probability of 0.0113. Conversely, central transfer fund instruments have not shown statistical significance: DAU has a negative effect (coefficient -0.982788; prob. 0.8227), while DAK (coefficient 0.270609; prob. 0.1944) and DBH (coefficient 1.400562; prob. 0.0815) show a positive relationship direction, but are not statistically significant. Simultaneously, these four variables are proven to affect poverty fluctuations (F-statistic probability 0.000000) with a coefficient of determination (R-squared) of 93.10%. The</i>

implications of these findings indicate that local fiscal independence plays a crucial role in reducing poverty rates, hence regional governments need to optimize regional revenues and improve the quality of public spending oriented toward poverty alleviation.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan daerah, yang tidak hanya mencerminkan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Di Provinsi Gorontalo, persoalan kemiskinan menunjukkan dinamika fluktuatif yang diwarnai oleh disparitas antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun persentase kemiskinan tingkat provinsi mengalami tren penurunan dari 18,32% pada tahun 2015 menjadi 13,24% pada tahun 2025, ketimpangan antardaerah pembentuknya masih cukup tajam. Memasuki periode 2024, Kabupaten Boalemo mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 17,83%, disusul secara berurutan oleh Kabupaten Pohuwato (17,11%), Kabupaten Gorontalo Utara (16,86%), dan Kabupaten Gorontalo (16,43%). Angka ini sangat kontras dengan Kota Gorontalo yang memiliki ekosistem perkotaan dan mampu menekan angka kemiskinannya hingga berada pada level 5,74% pada tahun yang sama. Disparitas ini mengindikasikan bahwa akselerasi kesejahteraan belum terdistribusi secara merata di seluruh yurisdiksi.

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, instrumen kebijakan fiskal memainkan peran vital untuk memutus lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Kapasitas fiskal daerah yang ditopang oleh aliran dana transfer pusat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta penerimaan otonom melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara teoretis semestinya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membiayai prioritas pembangunan. DAU bertindak sebagai penyeimbang ketimpangan kemampuan keuangan antar wilayah. DAK dialokasikan untuk mendanai agenda prioritas nasional, sedangkan DBH merupakan kompensasi proporsional bagi daerah penghasil sumber daya. Melengkapi instrumen tersebut, PAD merupakan manifestasi kemandirian fiskal yang menjamin fleksibilitas program lokal. Namun, peningkatan besaran kapasitas fiskal tersebut belum tentu berbanding lurus dengan perbaikan indeks kemiskinan apabila efektivitas belanja daerah belum dioptimalkan untuk menyentuh sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan produktivitas masyarakat prasejahtera.

Tinjauan terhadap literatur terdahulu mendeteksi adanya inkonsistensi (*research gap*) yang mencolok terkait efektivitas dana transfer dan kemandirian fiskal terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian Fajri et al. (2020) mengonfirmasi bahwa injeksi PAD dan DAU sangat efektif memangkas populasi kemiskinan, namun DAK justru berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, studi Muhardinata (2022) di Sumatera

Utara menyimpulkan bahwa instrumen dana transfer maupun PAD gagal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan rasio kemiskinan daerah. Benturan hasil empiris ini menegaskan bahwa interaksi antara postur APBD dan kemiskinan teritorial menolak untuk digeneralisasi secara linear. Terlebih lagi, masih sangat terbatas kajian mutakhir yang secara spesifik menguji determinasi serentak antara DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap fluktuasi kemiskinan di 6 kabupaten/kota Provinsi Gorontalo dengan menggunakan observasi jangka panjang berupa data panel. Merespons kesenjangan penelitian tersebut, riset ini didesain untuk mengevaluasi secara empiris kausalitas antara variabel instrumen kapasitas fiskal dan laju kemiskinan struktural selama periode 2015-2025.

Berdasarkan konfigurasi latar belakang dan perdebatan literatur tersebut, penelitian ini memformulasikan 3 (tiga) rumusan masalah utama sebagai berikut:

- a. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo?
- b. Seberapa besar pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo?
- c. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo?

Sejalan dengan spesifikasi perumusan masalah, penelitian ini menetapkan 3 (tiga) tujuan penelitian:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

2. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan tidak sekadar merepresentasikan keterbatasan finansial, melainkan manifestasi dari ketidakmampuan individu mengakses pemenuhan standar hidup minimum, mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga jaminan kesehatan. Mengacu pada konsep "lingkaran setan kemiskinan" (*vicious circle of poverty*), produktivitas yang minim senantiasa menjebak masyarakat pada level pendapatan yang rendah, yang pada gilirannya menekan daya beli dan kapasitas tabungan pembentukan modal, sehingga kemiskinan secara konsisten mereproduksi dirinya sendiri dalam ekosistem ekonomi yang stagnan. Kemiskinan sendiri termanifestasi dalam berbagai klasifikasi, mulai dari kemiskinan absolut yang terikat ketat pada ketidakmampuan melewati garis pemenuhan kebutuhan esensial, kemiskinan relatif akibat kebijakan pembangunan yang memicu ketimpangan, kemiskinan kultural yang mengakar pada mentalitas dan kebiasaan antiproduktif kelompok, hingga kemiskinan struktural yang dikondisikan oleh dominasi sistem sosial-politik yang memblokir akses publik terhadap kelola sumber daya. Secara operasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi

angka kemiskinan berlandaskan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui mekanisme perhitungan tersebut, batas garis kemiskinan diakumulasikan dari nilai minimum pengeluaran makanan, yang dipatok sebesar 2.100 kilokalori per kapita setiap harinya, dipadukan bersama pengeluaran non-makanan primer seperti akses perumahan dan pendidikan.

Sebagai strategi membongkar belenggu kemiskinan struktural tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal menugaskan instansi pemerintah daerah untuk mengintervensi roda kesejahteraan masyarakat melalui mobilisasi anggaran belanja. Instrumen intervensi pembiayaan ini bertumpu pada kerangka aliran dana transfer pusat dan besaran kapasitas penerimaan lokal. Dana transfer bertindak sebagai instrumen penyeimbang atas ketimpangan fiskal vertikal maupun ketidakmerataan horizontal antarwilayah. Komponen pendanaan utamanya mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), yang diformulasikan khusus untuk meratakan kapasitas fiskal daerah dengan menyuntikkan subsidi berdasarkan celah selisih (*fiscal gap*) antara kebutuhan daerah dan potensi pendapatan aslinya. DAU dioperasikan melalui dua jalur: *Specific Grant* yang penggunaannya diikat ketat oleh mandat pusat untuk sektor krusial seperti operasional pendidikan dan pembayaran aparatur sipil, serta *Block Grant* yang sepenuhnya menyerahkan diskresi dan otonomi bagi daerah untuk membelanjakan anggaran sesuai skala prioritas pembangunannya.

Bersanding dengan DAU, pemerintah pusat mendistribusikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai injeksi pembiayaan bersyarat (*conditional grant*) guna mendanai agenda fisik dan non-fisik spesifik yang beririsan langsung dengan target makro nasional, mencakup pengadaan sarana infrastruktur transportasi serta tunjangan jaminan operasional layanan kesehatan. Instrumen transfer berikutnya, Dana Bagi Hasil (DBH), dieksekusi berlandaskan prinsip asas keadilan distributif atau *fiscal federalism*. Melalui kerangka DBH, daerah penghasil ekstraksi sumber daya alam atau entitas penyumbang rasio pajak terbesar akan menerima pengembalian nominal proporsional dari kas negara guna mengakselerasi laju perekonomian lokal sekaligus menanggulangi eksternalitas negatif dari eksploitasi lingkungan di wilayah administratifnya.

Melengkapi aliran pendanaan desentralisasi tersebut, independensi sebuah otonomi daerah secara konkret diukur dari postur Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mengakumulasi penerimaan murni dari regulasi pungutan pajak daerah, retribusi optimalisasi layanan publik, serta laba kelola tata aset ekonomi lokal. Tingginya persentase rasio PAD mengindikasikan matang dan sehatnya fondasi perekonomian sebuah entitas kabupaten atau kota. Kapasitas pencetak PAD yang masif memerdekakan pemerintah daerah dari ketergantungan dominasi intervensi pusat, sekaligus melipatgandakan keleluasaan ruang fiskal (*fiscal space*) untuk memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adaptif, menyentuh target krusial, dan terkalibrasi dengan sosiologi demografi masyarakat di daerahnya.

Penelitian ini meletakkan jangkar argumentasinya pada rentetan literatur terdahulu yang menangkap dinamika kausalitas fluktuatif antara intervensi anggaran fiskal dan tren kemiskinan teritorial. Mengukur rasio efektivitas aliran dana pusat, investigasi empiris Fajri et al. (2020) memvalidasi bahwa injeksi DAU sangat sukses memangkas populasi kemiskinan secara riil dan terukur di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Simpulan

tersebut beresonansi presisi dengan analisis Amami & Asmara (2022) di Kabupaten Ngawi, yang memperkuat premis kemampuan DAU dalam menggerus ketimpangan rasio penduduk miskin. Kontradiktif tajam dengan premis-premis sukses tersebut, pengujian Nany et al. (2022) dan eksplorasi Triyulianto et al. (2024) melacak anomali statistik di mana akumulasi pencairan DAU serta DAK justru menjadi katalis yang menstimulasi pembengkakan angka kemiskinan. Menelaah kompensasi daerah melalui variabel DBH, Rasu et al. (2019) merumuskan keberadaan dampak negatif yang gagal menembus batas signifikansi statistik. Anomali ini sukses ditepis oleh pembuktian dari Nany et al. (2022) yang mempertontonkan bahwa optimalisasi realisasi serapan DBH memiliki relasi mutlak dalam mengeliminasi kemiskinan publik. Di sisi instrumen independensi lokal, validasi yang dibangun oleh Zulfatoni & Firmansyah (2024) mengangkat fungsi PAD sebagai roda penggerak vital untuk melumpuhkan pertumbuhan populasi miskin. Berkebalikan dari hasil ideal tersebut, investigasi Muhardinata (2022) yang berpusat di Sumatera Utara mendeklarasikan bahwa penguatan PAD, berbarengan dengan seluruh lini distribusi dana transfer pusat, gagal memperlihatkan signifikansi matematis terhadap perbaikan kualitas kesejahteraan penduduk marginal.

Benturan berbagai simpulan kausalitas empiris ini meletakkan penelitian pada *research gap* yang sangat terbuka untuk diisi dan dipecahkan. Menempati celah perdebatan di antara divergensi temuan lampau, riset ini membangun desain pengujian yang merajut seluruh anasir dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH) secara integratif dengan kapasitas mandiri ekonomi lokal (PAD) menggunakan kerangka analitik regresi data panel. Lokus pengujian secara presisi dipetakan pada klaster enam yurisdiksi kabupaten/kota pembentuk Provinsi Gorontalo, dengan menarik deret periode observasi melintasi satu dekade penuh (2015–2025) untuk mengamankan bukti empiris efek stabilitas perputaran belanja daerah jangka panjang.

Secara epistemologis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas argumen rasional bahwa lonjakan fleksibilitas kapasitas fiskal daerah otomatis menaikkan daya ledak belanja permodalan pemerintah lokal untuk menuntaskan program layanan sosial, meretas ketertinggalan pendidikan dasar, subsidi kesehatan, hingga penetrasi infrastruktur urat nadi desa. Intervensi struktural yang dibiayai penuh oleh orkestrasi serapan DAU, DAK, DBH, dan PAD ini diproyeksikan bakal menstimulasi laju produktivitas penduduk kelas bawah, mencetak suplai lapangan kerja riil, serta menggusur rasio presentase komunitas di bawah batas kemiskinan. Memadatkan lintasan probabilitas empiris tersebut guna menjawab tuntutan rumusan masalah pada struktur sebelumnya, observasi analisis ini memajukan 3 (tiga) konstruksi hipotesis dasar:

- a. H1: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga memiliki pengaruh secara parsial terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
- b. H2: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga memiliki pengaruh secara parsial terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

- c. H3: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan diduga memiliki pengaruh terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis regresi data panel yang mengintegrasikan data deret waktu (*time series*) selama 11 tahun (periode 2015–2025) dan data silang tempat (*cross section*) dari 6 entitas administratif kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Konfigurasi dari dimensi temporal dan spasial tersebut membentuk total amatan sebanyak 66 observasi data.

Seluruh instrumen diukur menggunakan data sekunder yang diakses dari publikasi otoritas negara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (POV), yang didefinisikan secara operasional sebagai persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah batas mutlak garis kemiskinan minimum (bersatuan persen, %), bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel independen terdiri atas empat pilar kapasitas fiskal yang seluruhnya bersumber dari basis data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan satuan ukur nominal Rupiah (Rp), yaitu: (1) DAU: total realisasi dana pemerataan fiskal dari APBN; (2) DAK: total realisasi dana bersyarat untuk program prioritas nasional; (3) DBH: distribusi persentase pendapatan APBN sebagai insentif balasan daerah; dan (4) PAD: penerimaan murni hasil eksploitasi dan pungutan hukum lokal daerah. Guna meredam anomali deviasi data nominal Rupiah dan menyelaraskan rentang dengan satuan persentase, seluruh variabel independen ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (LOG).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Kemiskinan (POV)	Persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah batas mutlak garis kemiskinan minimum.	BPS
DAU (X1)	Total pencairan Dana Alokasi Umum dari APBN sebagai instrumen pemerataan fiskal antardaerah (Rupiah).	DJPK
DAK (X2)	Total pencairan Dana Alokasi Khusus yang terikat untuk mendanai program prioritas nasional di daerah (Rupiah).	DJPK
DBH (X3)	Total distribusi persentase pendapatan APBN sebagai insentif balasan bagi daerah penghasil sumber daya (Rupiah).	DJPK
PAD (X4)	Total penerimaan otonom pemerintah daerah dari eksploitasi dan regulasi sumber potensi ekonomi lokal (Rupiah).	DJPK

Tahapan seleksi untuk menentukan spesifikasi model regresi ekonometrika dilakukan melalui pengujian statistik terstruktur. Uji Chow yang mempertarungkan *Common Effect Model* (CEM) melawan *Fixed Effect Model* (FEM) menghasilkan probabilitas Cross-section F sebesar 0.0000 (< 0,05), yang mengindikasikan bahwa FEM lebih superior dibandingkan CEM. Uji Hausman kemudian dilakukan untuk

membandingkan FEM dengan *Random Effect Model* (REM), yang menghasilkan probabilitas Cross-section random sebesar 0.0000 ($< 0,05$). Karena FEM secara konsisten memenangkan kedua pengujian tersebut, instrumen *Lagrange Multiplier* (LM) secara teknis tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, *Fixed Effect Model* (FEM) dikukuhkan sebagai spesifikasi yang paling akurat untuk mengestimasi parameter dalam penelitian ini.

Untuk menjamin estimator tidak bias dan memenuhi kelayakan ekonometrika data panel, model dipersyaratkan lolos dari uji asumsi klasik, yang difokuskan pada deteksi multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dan autokorelasi tidak diwajibkan sebagai syarat mutlak pada struktur data panel. Evaluasi diagnostik multikolinearitas menunjukkan bahwa matriks korelasi antar seluruh pasangan variabel independen tetap berada di bawah ambang batas toleransi 0,90 (korelasi tertinggi terjadi antara LOG(DAU) dan LOG(PAD) yang bernilai 0.696313). Hal ini menjamin bahwa model terbebas dari ancaman interkorelasi linear tingkat tinggi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas turut mengonfirmasi model memiliki sebaran varians antar residual yang konstan, dibuktikan oleh persentase nilai probabilitas variabel independen yang memotong di atas batas signifikansi 0,05: LOG(DAU) 0.2400, LOG(DAK) 0.4958, LOG(DBH) 0.8787, dan LOG(PAD) 0.2789.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi *Fixed Effect Model* (FEM), persamaan empiris penelitian diartikulasikan ke dalam struktur matematika berikut: $LOG(POV) = 61.11112 - 0.982788 LOG(DAU) + 0.270609 LOG(DAK) + 1.400562 LOG(DBH) - 2.309126 LOG(PAD)$.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Data Panel (FEM)

Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas	Keputusan
Konstanta (C)	61.11112	19.34960	3.158263	0.0026	Signifikan
Log (DAU)	-0.982788	4.341490	-0.226371	0.8227	Tidak Signifikan
Log (DAK)	0.270609	0.206497	1.310475	0.1944	Tidak Signifikan
Log (DBH)	1.400562	0.787679	1.778088	0.0815	Tidak Signifikan
Log (PAD)	-2.309126	0.880456	-2.622649	0.0113	Signifikan

Catatan: $R\text{-squared} = 0.931068$; $Prob(F\text{-statistic}) = 0.000000$

Mengacu pada arsitektur tabel tersebut, model matematika yang terbentuk dapat diartikulasikan ke dalam persamaan berikut:

$$LOG(POV)_{it} = 61.11112 - 0.982788 \cdot LOG(DAU)_{it} + 0.27060 \cdot LOG(DAK)_{it} + 1.400562 \cdot LOG(DBH)_{it} - 2.309126 \cdot LOG(PAD)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Secara simultan, orkestrasi keempat variabel anggaran (DAU, DAK, DBH, dan PAD) membuktikan daya determinasi yang mutlak terhadap tingkat kemiskinan, ditunjukkan oleh $Prob(F\text{-statistic})$ sebesar 0.000000 ($< 0,05$). Kapasitas serapan pemodelan (R-

squared) juga menyentuh angka 0.931068 (93,10%). Namun, tingginya daya penjas R-squared ini menuntut interpretasi yang sangat hati-hati. Besaran persentase tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan kekuatan kausalitas linear murni dari variabel anggaran, melainkan ikut dipengaruhi secara kuat oleh penyerapan karakteristik unik lintas sektoral (fixed characteristics) dari masing-masing 6 daerah. Wilayah seperti Kota Gorontalo yang disokong oleh ekosistem niaga secara bawaan memiliki elastisitas yang jauh lebih baik dalam menahan laju kemiskinan dibandingkan wilayah yang sangat bergantung pada fluktuasi panen agraria, terlepas dari besar-kecilnya intervensi kas pemerintah.

Membongkar estimasi secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdiri sebagai instrumen tunggal yang berhasil menyumbangkan koefisien negatif secara meyakinkan (-2.309126) dan didukung oleh signifikansi matematis yang valid dengan p-value 0.0113 (< 0,05). Hal ini mendemonstrasikan bahwa peningkatan ruang fiskal otonom berkontribusi nyata menyusutkan angka populasi prasejahtera. Signifikansi PAD sesungguhnya mencerminkan denyut nadi perekonomian organik di lapisan akar rumput. Tingginya persentase PAD bersumber langsung dari vitalitas perdagangan, gairah sektor jasa, retribusi perizinan, dan mobilitas UMKM lokal yang bertumbuh kembang. Besarnya kapasitas pencetak PAD memerdekakan pemerintah daerah dari ketergantungan pusat, sekaligus melipatgandakan keleluasaan pemerintah untuk mengeksekusi langsung agenda perlindungan sosial dan perluasan modal usaha rakyat tanpa belenggu instruksi hirarkis.

Sebaliknya, realitas empiris memaparkan bahwa seluruh instrumen aliran transfer yang dikoordinasi dari pusat gagal mencetak pengaruh yang signifikan secara statistik. Dana Alokasi Umum (DAU) memproyeksikan korelasi negatif sebesar -0.982788, namun terganjal oleh p-value 0.8227 (> 0,05). Kegagalan DAU mendobrak dinding signifikansi bersumber dari orientasi anatomi alokasinya. Dominasi DAU (*Specific Grant*) kerap habis terserap sekadar untuk menalangi rutinitas birokrasi dan melunasi belanja pegawai aparatur (penggajian PPPK). Hal ini menyisakan ruang fiskal (*fiscal space*) yang terlampau sempit bagi manuver pemberdayaan sosial, sehingga guyuran miliaran rupiah DAU gagal bertransmisi menciptakan lapangan kerja kelas bawah.

Sementara itu, DAK (koefisien 0.270609; prob. 0.1944) dan DBH (koefisien 1.400562; prob. 0.0815) justru melenceng dengan memproyeksikan arah korelasi positif, meskipun sifatnya tidak signifikan. Anomali pada DAK berkaitan dengan problem *policy endogeneity*; wilayah yang terdeteksi mengantongi indeks kemiskinan tajam dan defisit infrastruktur yang krusial justru didesain menerima rasio DAK tertinggi. Terlebih, realisasi DAK Fisik (jembatan, aspal poros desa, sarana klinis) adalah portofolio jangka panjang yang faedah ekonominya baru dapat dituai beberapa tahun kemudian (time lag). Oleh sebab itu, di dalam batasan jendela waktu amatan ini, rasio kemiskinan belum menyusut drastis. Di sisi lain, inelastisitas DBH dikondisikan oleh belum berdirinya industri ekstraktif berskala raksasa di Gorontalo. Minimnya likuiditas DBH ini diperburuk oleh pembatasan skema alokasi (earmarking) kaku dari kementerian, sehingga kepala daerah kehilangan wewenang untuk menyuntikkan dana kompensasi alam tersebut ke rekening *social safety net* atau insentif bantuan UMKM.

5. Kesimpulan

Berdasarkan eksplorasi empiris atas analisis regresi data panel kapasitas fiskal daerah terhadap fluktuasi kemiskinan di 6 kabupaten/kota Provinsi Gorontalo periode 2015-2025, dapat ditarik dua konklusi utama:

- a. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tampil sebagai satu-satunya pilar kapasitas fiskal yang terbukti memberikan pengaruh negatif dan memegang peranan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan daerah. Sebaliknya, instrumen desentralisasi finansial yang disuntikkan dari kas negara, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), belum mampu memberikan determinasi secara parsial yang signifikan secara statistik terhadap pelemahan agregat penduduk miskin.
- b. Secara simultan, integrasi seluruh kekuatan kas pemerintah lokal (DAU, DAK, DBH, dan PAD) terbukti secara meyakinkan memiliki pengaruh yang krusial dan mutlak dalam membimbing tren penanggulangan kemiskinan teritorial.

6. Saran

Menyikapi temuan rasionalitas fiskal tersebut, direkomendasikan sejumlah intervensi strategis bagi pemangku kebijakan, di antaranya:

- a. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah: Pemerintah perlu mereviu secara radikal arsitektur distribusi belanja agar transfer DAU tidak habis diserap untuk belanja aparatur birokrasi rutin, melainkan harus dialihkan untuk mendanai program padat karya demi perluasan sirkulasi tenaga kerja lokal.
- b. Penguatan Basis Pajak dan Retribusi Daerah: Pemerintah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi ekonomi asli dengan berinovasi dalam memajaki sektor potensial melalui digitalisasi, yang dilakukan dengan presisi agar tidak melahirkan regulasi retribusi yang membebani masyarakat kelas bawah.
- c. Pengembangan Ekonomi Lokal: Mengeksekusi akselerasi pertumbuhan sektor UMKM, perikanan, serta pertanian bernilai tambah yang terbukti selaras dengan denyut peningkatan PAD di level akar rumput.
- d. Pengalokasian PAD untuk Program Pemberdayaan: Surplus independensi finansial yang dicetak melalui PAD wajib direalokasikan kembali sebagai modal injeksi ke sektor kesehatan publik, jaring pengaman sosial, dan kemandirian wirausaha komunitas rentan.

7. Daftar Pustaka

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11(2), 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 32(3), 167–186.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo*. Diakses dari bps.go.id.

- Basna, F. E., & Salle, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5, 73–83.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Dalimoenthe, I. (2023). *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2026). *Data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari djpk.kemenkeu.go.id.
- Fajri, M. B., Astuti, S. Y., & Hanaf, M. I. (2020). The Effect of Local Own Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Poverty Rate in the Special Region of Yogyakarta and Central Java Province. *Management and Business Research*, 1(2), 109–120.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, S., et al. (2021). Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 707–712. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.2335>
- Isramiwarti, R., et al. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Muhardinata. (2022). *Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. (Tesis). Universitas Sumatera Utara.
- Nugroho, M. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2003–2005.
- Pratomo, A. A. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta*. Universitas Diponegoro.
- Purnamawati, I. G. A., et al. (2024). *Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(4), 12–25.

- Sandjaja, F. R., et al. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 21–31. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.21-31>
- Trianto, L., & Panggabean, M. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Khatulistiwa*, 5(1), 23–36.
- Triyulianto, T., et al. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Good Governance*, 20(4), 111–128